

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kegagalan program Pendidikan Kewarganegaraan di masa lalu untuk melahirkan warga negara Indonesia yang demokratis dan toleran telah menginspirasi banyak kalangan untuk menemukan format baru pendidikan demokrasi di Indonesia. Salah satunya dengan memodifikasi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai integral dari Pendidikan Demokrasi (Ubaedillah, 2010:1)

Untuk melahirkan warga negara Indonesia yang demokratis perlunya paradigma baru dalam pembelajaran. Paradigma dalam hal ini merupakan kesepakatan dari suatu komunitas tentang hal-hal yang bersifat mendasar seperti : materi pokok keilmuan, sudut pandang atau orientasi, visi dan misi. Komunitas dalam hal ini adalah komunitas Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran penting dalam pengembangan serta kemajuan masyarakat madani (*civil society*). Dalam Pasal 3 undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional, “Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi siswa menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.

Dalam hal ini pendidikan dengan paradigma lama jelas tidak dapat berfungsi sebagai sarana pemberdayaan warga negara, bahkan sebaliknya justru dapat menjadikan warga negara semakin tidak berdaya. Sedangkan paradigma baru yang diusulkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan haruslah berorientasi pada terbentuknya masyarakat sipil (*civil society*), dengan memberdayakan warga negara melalui proses pendidikan, agar mampu berperan serta aktif dalam sistem Pemerintahan Negara yang demokratis.

Adapun hakekat dari pemberdayaan warga negara adalah pembangunan sumber daya manusia, sehingga cara yang dipandang paling strategis adalah melalui pendidikan. Guru memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pencapaian tujuan pendidikan. Melalui kompetensi-kompetensi yang dimiliki, maka guru berperan dalam pengembangan serta kemajuan siswa baik dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Bukan hanya itu saja, guru juga harus membentuk kepribadian atau perilaku siswa yang baik dengan membangun karakter siswa tersebut sesuai dengan paradigma baru.

Sebagai warga negara yang baik (*be a good citizen*) siswa harus memiliki pengetahuan serta pemahaman sadar akan hak dan kewajibannya, mampu mengkritisi, serta partisipasi, dan tanggungjawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini agar keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat terbentuk menjadi masyarakat mandiri yang disebut dengan madani (*civil society*).

Adapun Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan memiliki struktur keilmuan yang sangat jelas yakni berbasis pada ilmu politik, hukum, serta filsafat

moral/filsafat pancasila yang memiliki visi yang kuat dalam pemberdayaan warga negara. Paradigma baru PKn sering disebut sebagai pendidikan kewarganegaraan yang bermutu karena dalam paradigma pendidikan kewarganegaraan mencakup tiga aspek keilmuan, yaitu *civic knowledge*, *civic skills*, *civic disposition*.

Hamidsyukrie (2014:218, Vol.21, No.3) menyebutkan, PKn dengan paradigma barunya memiliki tugas mengembangkan pendidikan demokratis dengan mengemban tiga fungsi pokok, yakni: mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelligence*), membina tanggungjawab warga negara (*civic responsibility*), dan mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*).

Fungsi pertama, diarahkan pada terbentuknya warga negara yang cerdas. Kecerdasan yang dimaksud sejatinya bukan hanya kecerdasan dalam dimensi rasional saja, namun lebih dari itu haruslah meliputi seluruh ranah konstruksi diri dalam dimensi spiritual, emosional, dan sosial. Jika keseluruhan dimensi ini dapat dikembangkan, maka ciri khas PKn akan nampak pada diri siswa yang memiliki kecerdasan multi dimensional.

Fungsi kedua, tanggungjawab warga negara diarahkan pada pembentukan pribadi siswa yang memiliki rasa tanggungjawab mulai pada area yang terkecil (sempit) di sekitar kehidupan sehari-harinya sampai dengan kebutuhan global yang terkait hubungan paling luas antarmanusia.

Fungsi ketiga, terwujudnya partisipasi warga negara dimaksudkan untuk membentuk pribadi siswa yang sejak dini telah terlibat pada aktivitas-aktivitas positif di lingkungan yang terdekat dengan kehidupannya sehari-hari sampai

dengan lingkungan masyarakat global yang menggambarkan hubungan antar manusia pada dimensi yang lebih luas.

Menurut pengamatan saat ini, tingkat pemahaman serta kesadaran siswa dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik masih terlihat minim. Serta pembelajaran yang terlalu monoton sehingga siswa kurang tertarik pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Hal itu tampak terlihat dari perilaku sehari-hari siswa di sekolah, yaitu masih cenderung memiliki sikap tidak mau tahu terhadap peraturan yang diberlakukan di sekolah, masih sering menimbulkan konflik antar teman, kurang disiplin dalam belajar, tidak memiliki jiwa nasionalisme, kurang antusias terhadap informasi kebangsaan, bersifat individualistis yang dipengaruhi oleh media sosial yang sangat berkembang pesat saat ini dan perlunya peranan guru PKn dalam mendidik siswa menjadi warga negara yang mengetahui akan hak serta kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan pengamatan di lapangan yakni di sekolah MAS Plus Al-Ulum Medan, tampak bahwa pemahaman antara keseimbangan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang dapat diandalkan masih cenderung rendah. Selain itu, kurang disiplinnya siswa di sekolah juga menunjukkan masih rendahnya karakter pada siswa kelas X di MAS Plus Al-Ulum Medan. Seperti yang telah disebutkan bahwa paradigma baru pendidikan merupakan pendidikan untuk pemberdayaan atau pembangunan, maka guru PKn harus berkontribusi atau berperan penting dalam mewujudkan siswa yang *be a good citizen/desirable personal qualities*.

Dengan adanya latar belakang masalah di atas menjadi dasar bagi penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Guru Sebagai Fasilitator Dalam Mengimplementasikan Paradigma Baru PKn Di MAS Plus AI-Ulum Medan Tahun Pelajaran 2017/2018”**.

1.2 Batasan Masalah

Pembatasan masalah mutlak dilakukan dalam setiap penelitian, agar penelitian terarah dan juga tidak luas. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sukmadinata (2005:301) bahwa: “Pembatasan masalah ialah membatasi variabel atau aspek mana yang diteliti dan mana yang tidak diteliti”.

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan hasil yang mengambang, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, yaitu pembelajaran PKn yang hanya mencakup kepada pengetahuan siswa saja, siswa kurang tertarik pada pelajaran kewarganegaraan, dan peran guru sebagai fasilitator dalam mengimplementasikan paradigma baru PKn. Oleh karena itu, dalam penelitian ini yang menjadi pembatasan masalah ialah peran guru sebagai Fasilitator dalam mengimplementasikan paradigma baru PKn di MAS Plus AI-Ulum Medan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peran guru sebagai fasilitator dalam mengimplementasikan paradigma baru PKn di MAS Plus AI-Ulum Medan?

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai. Untuk itu dengan tujuan yang jelas akan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Adapun yang meliputi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran faktual mengenai peran guru sebagai fasilitator dalam mengimplementasikan paradigma baru PKn di MAS Plus Al-Ulum Medan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk dapat mengungkapkan fenomena yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan siswa yang baik (*good citizen*) atau dapat diandalkan (*desirable personal qualities*) melalui paradigma baru PKn. Dengan terlaksananya penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik yang bersifat teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai suatu karya ilmiah maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi masyarakat pada umumnya mengenai: peran guru sebagai fasilitator dalam mengimplementasikan paradigma baru PKn di MAS Plus Al-Ulum Medan.

- b. Untuk menambahkan wawasan bagi penulis dalam menulis karya tulis dan bagi setiap calon guru khususnya guru PKn terkait paradigma baru pada Pendidikan Kewarganegaraan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi tentang pentingnya pembelajaran PKn dalam membentuk *good citizen/desirable personal qualities* pada siswa.
- b. Bersifat mendidik dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

THE
Character Building
UNIVERSITY